

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten
Tahun 2025



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2026**

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. LKIP ini disusun berdasarkan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara umum, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Dari sisi kinerja fisik, sebagian besar indikator kinerja strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada sasaran meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh perencanaan dan pengendalian yang relatif memadai.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran berada pada kisaran optimal dan selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang berada di bawah atau sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sehingga mencerminkan penggunaan sumber daya yang relatif efisien dan berorientasi pada hasil (*value for money*).

Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, khususnya pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan (*Forestry and Other Land Uses/FOLU*). Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik kegiatan kehutanan yang bersifat jangka panjang, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, serta pengaruh faktor eksternal seperti tekanan pemanfaatan lahan dan kondisi lingkungan yang dinamis.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berkomitmen untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah optimal serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator yang belum tercapai. Upaya perbaikan diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan sinergi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyusunan LKIP ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan di Provinsi Banten.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKIP ini merupakan wujud komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

LKIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya selama Tahun 2025, sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, di mana sebagian besar sasaran dan indikator kinerja strategis dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan upaya perbaikan, yang akan dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Akhir kata, kami berharap LKIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten



Dr. Wawan Gunawan, S.Sos., M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Isu-isu Strategis.....	5
1.6 Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis 2025-2029	7
2.2. Rencana Kerja 2025.....	8
2.3. Perjanjian Kinerja 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.....	10
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	10
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	23
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	23
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	24
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	28
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	29
3.2 Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran saran rekomendasi	43
LAMPIRAN	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan SAKIP merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki karakteristik yang kompleks serta menghadapi tantangan yang semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, serta upaya pelestarian sumber daya hutan menuntut adanya kinerja perangkat daerah yang terukur, efektif, dan berdampak nyata. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja yang baik menjadi kebutuhan mendasar guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahun 2025 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten serta periode penting dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada konteks ini, pengukuran dan evaluasi kinerja menjadi instrumen pengendalian manajemen yang penting untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan kinerja tersebut disusun sebagai media untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, serta sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, sekaligus sebagai bahan evaluasi internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja, tingkat efektivitas penggunaan

sumber daya, serta upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
7. Pergub Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
8. Pergub Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pergub Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

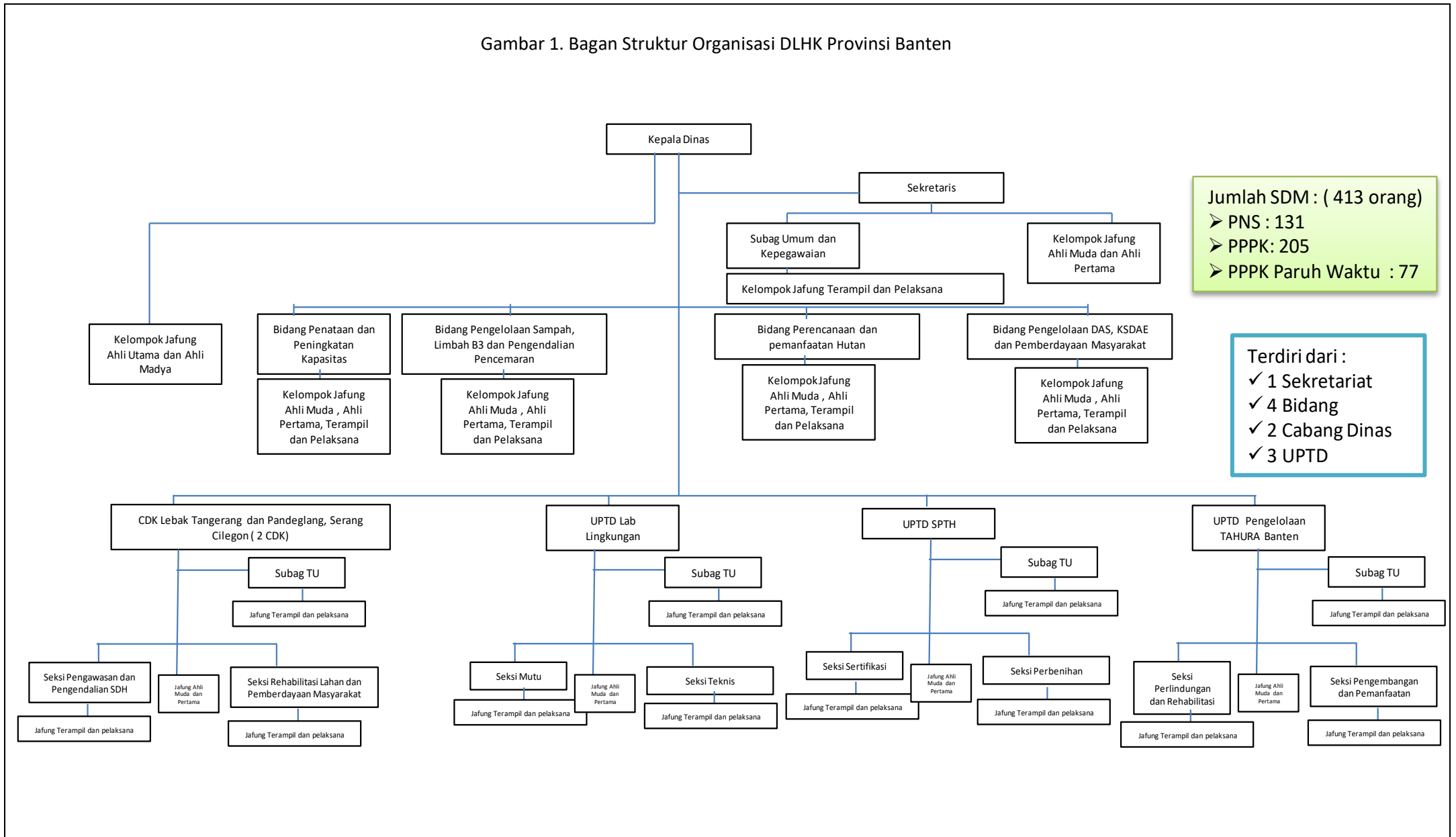
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
- g. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- j. Pengelolaan Persampahan;
- k. Pengelolaan Hutan;
- l. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- m. Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DLHK Provinsi Banten



Jumlah SDM : (413 orang)
 ➤ PNS : 131
 ➤ PPPK: 205
 ➤ PPPK Paruh Waktu : 77

Terdiri dari :
 ✓ 1 Sekretariat
 ✓ 4 Bidang
 ✓ 2 Cabang Dinas
 ✓ 3 UPTD

1.5 Isu-isu Strategis

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam mendukung target makro RPJMD sangat signifikan. Beberapa target yang menjadi tanggung jawab langsung sektor lingkungan hidup di antaranya adalah peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hingga 70,00 serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 5,11 persen secara kumulatif dan 20,19 persen secara tahunan pada tahun 2030. Kedua indikator ini menjadi bagian dari kerangka kinerja daerah yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan terintegrasi dengan perangkat daerah lain.

Selain menjalankan fungsi teknis operasional, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga berkontribusi terhadap perwujudan misi kepala daerah, khususnya misi ke-5 dalam RPJMD, yaitu “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana”.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam Renstra 2025-2029 adalah Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup, kelestarian hutan dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten memiliki kontribusi langsung terhadap beberapa sasaran utama, di antaranya: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya emisi gas rumah kaca, dan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selaras dengan tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan. Hal ini akan diwujudkan melalui penguatan sistem pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

1.6 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan LKIP juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Renstra Tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
6. telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
9. ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reviu
- 3) Lain - lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 tanggal 9 September 2025.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berkontribusi terhadap perwujudan misi kepala daerah, khususnya misi ke-5 dalam RPJMD, yaitu “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana”.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Renstra 2025-2029 adalah **Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup, kelestarian hutan dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan**. Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks Kualitas Air
 - b. Indeks Kualitas Udara
 - c. Indeks Kualitas Air Laut
 - d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
3. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu) dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

Target sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	67.53	67.73	67.93	68.13	68.33
	Indeks Kualitas Udara	64.27	64.67	65.07	65.47	65.87
	Indeks Kualitas Air Laut	83.06	83.11	83.16	83.21	83.26
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61.84	61.91	61.98	62.05	62.12
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	9.80	10.30	10.80	11.30	11.80
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	41.67	45.10	48.15	51.72	54.10

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Renstra DLHK 2025

Sasaran strategis Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam renstra tahun 2025-2029 mendukung tercapainya sasaran daerah dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif (%) serta Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan (%)

2.2. Rencana Kerja 2025

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui beragam kegiatan, seperti perencanaan lingkungan hidup yang efektif, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, penegakan kepatuhan perizinan lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan. Penguatan kapasitas SDM di bidang lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan peningkatan layanan laboratorium lingkungan juga menjadi prioritas. Indikator yang digunakan meliputi IKLH, persentase rekomendasi kajian lingkungan yang ditindaklanjuti, persentase RTH, hingga persentase limbah B3 yang terkelola.

Di sektor kehutanan, program prioritas diarahkan pada rehabilitasi lahan kritis, pelestarian fungsi DAS, peningkatan produktivitas hasil hutan, serta penguatan kelompok tani dan perhutanan sosial. Capaian diukur melalui luas lahan kritis yang direhabilitasi, jumlah bibit bersertifikat yang ditanam, persentase tutupan lahan pada sempadan DAS, dan peningkatan kapasitas kelompok usaha kehutanan. Kegiatan ini tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui program pemberdayaan dan pelatihan.

Pengendalian emisi gas rumah kaca dilakukan melalui pengelolaan persampahan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi sumber daya alam hayati. Program ini mencakup peningkatan peran masyarakat dalam konservasi di berbagai wilayah, pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Indikatornya mencakup indeks kinerja pengelolaan sampah, indeks keanekaragaman hayati, hingga persentase pengelolaan Tahura. Seluruh program dirancang untuk membangun tata kelola lingkungan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, guna mendukung tercapainya visi Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi serta target pembangunan rendah karbon.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 mengalami perubahan pada sasaran dan indikator sasaran, perubahan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Dari aspek anggaran, Pagu Anggaran

dalam APBD murni dengan APBD Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025						Perubahan DPA-SKPD
Nomor : DPPA/A.3/2.11.3.28.0.00.02.0000/001/2025						
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
				(Rp)	(%)	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp316.120.000,00	Rp335.420.000,00	Rp19.300.000,00	5,75	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp316.120.000,00	Rp335.420.000,00	Rp19.300.000,00	5,75	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp69.916.968.256,00	Rp67.506.201.907,00	(Rp2.410.766.349,00)	(3,57)	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp30.260.935.000,00	Rp36.056.200.000,00	Rp5.795.265.000,00	16,07	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.656.033.256,00	Rp31.450.001.907,00	(Rp8.206.031.349,00)	(26,09)	
5 2	BELANJA MODAL	Rp7.317.636.744,00	Rp2.332.466.898,00	(Rp4.985.169.846,00)	(213,73)	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp5.940.000,00	Rp843.644.200,00	Rp837.704.200,00	99,30	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp6.961.696.744,00	Rp1.391.163.899,00	(Rp5.570.532.845,00)	(400,42)	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp350.000.000,00	Rp97.658.799,00	(Rp252.341.201,00)	(258,39)	

Gambar 1. Ringkasan DPA Perubahan DLHK 2025

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025 mengalami perubahan pada sasaran dan indikator sasaran, perubahan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tanggal 9 September Tahun 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Banten pada tanggal 28 Oktober 2025, perjanjian kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Nilai	67.53
		Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	83.06
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	64.27
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	61.84
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persen	9.80
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	41.67

Tabel 2. Matrik Sasaran, Indikator dan target dalam Perjanjian Kinerja DLHK 2025

Jumlah Program yang dilaksanakan dalam APBD Perubahan DLHK T.A 2025 adalah sebanyak 15 Program, 52 Kegiatan serta 141 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 69,838,668,805.

Adapun target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan DLHK T.A 2025 adalah sebesar Rp. 335,420,000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan di BAPPEDA Provinsi Banten pada tanggal 9 Januari 2026, nilai kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebesar 86,28 dengan Predikat Kinerja Organisasi Baik.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup mengenai hasil Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kualitas Udara serta Indeks Kualitas Tutupa Lahan diketahui bahwa nilai untuk masing masing indeks untuk Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

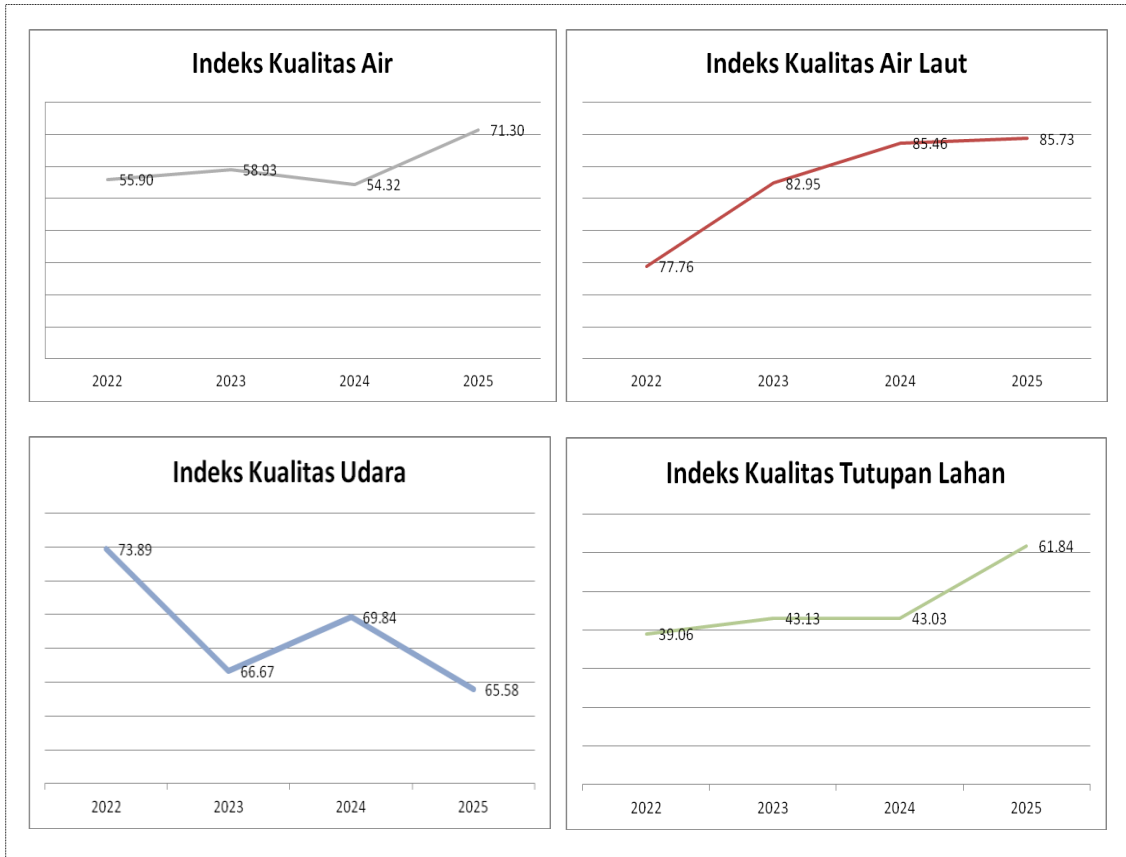
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Nilai	67.53	71.30	105.58
		Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	83.06	85.73	103.21
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	64.27	65.58	102.04
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	61.84	62.59	101.21
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persen	9.80	10.06	102.65
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	41.67	39.31	94.34

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025, indikator Indeks Kualitas Air memperoleh capaian terbesar dengan nilai capaian 105,58%, sedangkan indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan merupakan indikator dengan capaian terendah dengan nilai capaian 94,34%.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

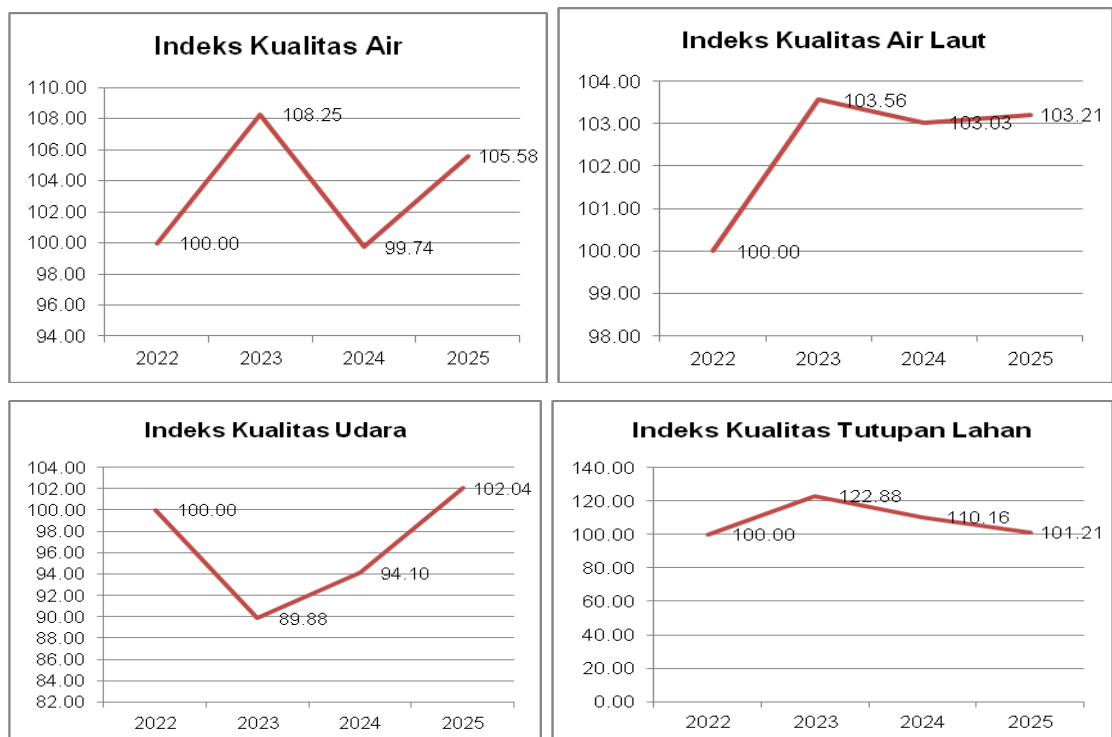
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk:

1. Realisasi kinerja untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2025 realisasi kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan relatif meningkat setiap tahunnya, sementara untuk Indeks Kualitas Udara relatif mengalami penurunan setiap tahunnya.

2. Capaian kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2025 capaian kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Tutupan Lahan capaiannya 100% sampai dengan diatas 100% untuk setiap tahunnya, sedangkan capaian untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dinamis untuk setiap tahunnya.

Untuk sasaran meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah serta sasaran meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor Forestry And Other Land Uses (Folu) tidak dapat dibandingkan realisasi sama capaiannya dengan tahun tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kedua sasaran tersebut merupakan sasaran baru pada tahun 2025.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 dengan tahun 2024 yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100 Persen	100	100 Persen	100
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2	100	2 Dokumen	100
	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1	100	3 Dokumen	100
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	100	2 Dokumen	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	64	104.07	71,30 Persen	93.49
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	100	3 dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	100	3 Dokumen	100
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1	100	14 Lokasi	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14.29	100	14,29 Persen	106.23
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100	100	100 persen	100
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	20	100	1 Dokumen	200
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100	100	100 Persen	100
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6	100	2 dokumen	100
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	100	5 Dokumen	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	100	2 Dokumen	100
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1	100	11,76 Persen	250.1
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	100	5 lembaga	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1	100	5 Dokumen	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100 Persen	100
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100 Persen	100
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	150	100	50 Orang	100
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	288	100	2 Lembaga	100
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	135/7	198.53	68 lembaga/7 Kabkota Lembaga/Kabkota	145.59
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	135/7	145.16	68/7 Lembaga/ Kab Kota	145.59
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100	100	75 Entitas	141.33
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	86.87	102.2	90 Persen	71.69

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	(PPLH)					
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	100 Persen	100
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	16	100	100 badan Usaha	133.3
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100 Persen	100
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100	100	100 Persen	100
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	20	100	20 Perkara	135
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	10	100	20 Pengaduan	275
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	44.57	178	25 Persen	126.08
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	6	120	3 dokumen	100
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	6	100	3 Dokumen	100
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4	100	1 dokumen	100
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1	100	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Produksi	di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	17	100	21 Unit Manajemen	100
	Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	1	100	1 Unit Manajemen	100
	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	6	100	20 Unit Manajemen	100
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	24	120	2 Unit Manajemen	100
	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneraan Sanksi Admnsitratif	15	100	301 Unit Manajemen	100
	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	9	180	10 Unit Manajemen	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			100 Persen	100
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2	100	1 Dokumen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	40	200	20 Persen	300

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100 Persen	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	100	920 Orang	100
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	280	100	1 Lembaga	100
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	58	123	75 Kelompok	73.33
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100	100	100 Persen	100
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	153	100	157 Orang	100
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	55	100	18 Kelompok	100
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	404 Ha	101.00	25 Hektar	100
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2830	113.20	2500 Ha	196.26
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah CDLHK LT)	1	100	1 dokumen	100
	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	100	1 Laporan	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	84.00	84.00	100 Persen	97.84

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	(CDLHK-LT)	Hutan Negara (CDLHK-LT)				
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	320	85	710 Ha	158.03
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara			6 Ha	83.33
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	100	1 Laporan	100
	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0	0	2 Ha	50
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2500 hektar per tahun wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2363.32	94.53	2500 Ha	57.80
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah CDLHK PSC)	1	100	100 Persen	100
	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	100	1 Dokumen	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100	100	100 Persen	138.14
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	63	100	532 Ha	164.41
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	5	100	1 Dokumen	100
	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	2	100	4 Ha	150
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	21.80	100	22,5 Persen	94.8

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan	5	100	2 Dokuman	100
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	52	100	124 Paket	100
	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan			6 Unit	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	100	3 Dokumen	100
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12	100	2 Dokumen	100
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	100	2 Laporan	100
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	99.12	110	90 Persen	92.67
	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	104	104	100 Persen	97.5
	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	100	1 Sertifikat	100
	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1	100	1 Sertifikat	100
	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1	100	3 Sertifikat	100
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	4	100	1 Laporan	100
	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	187.000	104	250.000 Batang	85
	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	1	100	1 Unit Usaha	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	64	104.07	66,66 Persen	93.49
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	100	3 dokumen	100
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	100	11 Laporan	100
	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1	100	8 Laporan	100
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	100	2 Dokumen	200
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi	101.55	101.55	179,16 Persen	179.16
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	101.55	101.55	139,58 Persen	139.58
	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	262 Ton	101.55	653,94 Ton	179.16
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1	100	2 Dokumen	100
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	28.57	100	28,57 Persen	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100	100	100 Persen	100
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	8 Ha	100	40 Ha	100
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	9	100	12 Kelompok	100.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	9	100	1 Laporan	100
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	100	1 Laporan	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	1	100	100 Persen	100
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	40	100	100 Orang	100
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	9	100	8 Kelompok	66.67
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1	100	1 Laporan	100
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	100	1 Laporan	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100	100	100 Persen	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	(CDLHK PSC)				
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	40	100	75 Orang	100
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100	100	100 Persen	100
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100	100	100 Persen	100
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	48	100	48 Operasi	100
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	3	100	30 Permohonan	100
	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1	100	1 Dokumen	100
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4	100	4 Desa	100
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2	100	2 Dokumen	100
	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12.5	100	12,5 Ha	100
	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	-	-	1 Dokumen	100

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dengan target yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	71.30	68.33
	Indeks Kualitas Udara	65.58	65.87
	Indeks Kualitas Air Laut	85.73	83.26
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62.59	62.12
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	10.06	11.8
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	39.31	54.1

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa hingga Tahun 2025 terdapat tiga indikator kinerja yang telah melampaui target akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025–2029, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Capaian tersebut menunjukkan adanya kinerja positif dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Meskipun demikian, penyesuaian kembali terhadap target indikator-indikator yang telah melampaui target akhir Renstra tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator kualitas lingkungan hidup yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kendali langsung perangkat daerah, seperti kondisi alam, perubahan iklim, aktivitas masyarakat, serta perkembangan kegiatan industri dan pemanfaatan ruang. Kondisi kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan dapat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu sehingga memiliki tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, penetapan dan penyesuaian target kinerja perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), keberlanjutan capaian, serta konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi capaian indikator tersebut lebih diarahkan pada upaya menjaga dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan agar kualitas lingkungan hidup tetap berada pada kondisi yang baik dan berkelanjutan.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dengan standar nasional dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja untuk menilai posisi capaian daerah terhadap tolok ukur yang ditetapkan secara nasional. Standar nasional tersebut bersumber dari ketentuan kementerian/lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, serta regulasi dan pedoman yang berlaku dalam pengukuran indikator kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi beberapa indikator kinerja utama pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang berada pada atau melampaui standar nasional yang ditetapkan. Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara umum berada pada kategori baik sesuai dengan klasifikasi penilaian nasional. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya bahkan terlampauinya sebagian besar indikator kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung utama, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, pendanaan, maupun partisipasi pemangku kepentingan. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi Daerah

Adanya keselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi faktor pendukung utama. Implementasi dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berdampak langsung pada optimalnya pencapaian indikator seperti Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan.

2. Konsistensi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran air, udara, dan lahan secara berkelanjutan serta berbasis pemantauan kualitas lingkungan yang terukur menjadi faktor penting dalam meningkatnya nilai indeks kualitas lingkungan. Kegiatan pemantauan rutin, pengawasan terhadap sumber pencemar, serta penegakan hukum lingkungan turut berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di Provinsi Banten.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, didukung oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program yang efektif. Penguatan peran unit pelaksana teknis serta koordinasi internal perangkat daerah juga mendorong percepatan pencapaian target kinerja.

4. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Capaian kinerja yang optimal tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan kewajiban lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi lingkungan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan pada tahun 2025 adalah:

- a. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama TNI, lembaga usaha/industri dan masyarakat dalam rehabilitasi lahan/lingkungan dalam Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Banten tahun 2025;
 - b. Pemberian Penghargaan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Periode 2023-2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah konsisten dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan usaha yang mereka jalankan.
 - c. Penertiban Kawasan Hutan dan Penanganan Kegiatan Ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pemerintah Provinsi Banten bersama unsur TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Gunung Halimun Salak, serta instansi terkait melaksanakan konferensi pers terkait penertiban kawasan hutan dan penanggulangan kegiatan ilegal di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
 - d. Bersama-sama anggota legislatif DPRD Provinsi Banten dan dinas lingkungan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memberikan bantuan kendaraan pengangkut sampah sebagai upaya mendukung kelancaran operasional bank sampah dalam pengangkutan sampah terpilah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengumpulan sampah dari rumah warga, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS melalui optimalisasi kegiatan bank sampah.
5. Dukungan Pendanaan dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif

Ketersediaan anggaran yang relatif memadai, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan sektor swasta, menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan pendanaan ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara lebih luas dan berkelanjutan.

6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup turut mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Program edukasi lingkungan, kampanye pengelolaan sampah, serta gerakan penghijauan dan rehabilitasi lahan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang berdampak positif terhadap kualitas lingkungan.

Meskipun secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian seluruh indikator kinerja strategis, khususnya pada indikator penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan (FOLU). Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengendalian terhadap Perubahan Tutupan Lahan

Alih fungsi lahan yang dipicu oleh tekanan pembangunan, perluasan kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini berdampak pada sulitnya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan secara optimal, terutama pada wilayah dengan tingkat tekanan pemanfaatan lahan yang tinggi.

2. Keterbatasan Kewenangan dan Kompleksitas Tata Kelola Kehutanan

Pengelolaan sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak lintas kewenangan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kompleksitas tata kelola tersebut berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga mempengaruhi capaian indikator FOLU.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung

Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta teknologi pendukung pemantauan dan pengendalian lingkungan, khususnya pada wilayah yang luas dan sulit dijangkau, menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan rehabilitasi lingkungan secara optimal.

4. Kepatuhan Dunia Usaha yang Belum Merata

Meskipun terdapat peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan, masih ditemukan sebagian usaha yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berdampak pada efektivitas pengendalian pencemaran dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal dan Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pada kegiatan perlindungan kawasan hutan dan rehabilitasi lahan, masih bersifat sporadis dan belum merata. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak jangka panjang kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya dukungan masyarakat.

Capaian indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (FOLU) yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Tingginya Tekanan Alih Fungsi Lahan

Masih terjadinya alih fungsi kawasan hutan dan lahan, baik untuk permukiman, infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi, berdampak pada berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya potensi emisi karbon. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan.

2. Keterbatasan Ruang Intervensi Pemerintah Daerah

Sebagian kawasan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga ruang intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya implementasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi.

3. Waktu Pemulihan Ekosistem yang Relatif Panjang

Program rehabilitasi hutan dan lahan memerlukan waktu yang relatif panjang untuk menunjukkan dampak nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam periode pelaporan tahun berjalan, hasil kegiatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian indikator kinerja.

4. Keterbatasan Data dan Sistem Pengukuran Emisi

Ketersediaan data emisi sektor kehutanan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi masih menjadi tantangan. Keterbatasan sistem pengukuran dan pelaporan emisi berdampak pada belum optimalnya penghitungan kontribusi program daerah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Rencana tindak lanjut peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten disusun untuk mempertahankan capaian indikator yang telah melampaui target serta meningkatkan capaian indikator yang belum mencapai target, khususnya pada sektor kehutanan (FOLU). Rencana tindak lanjut tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Perlindungan Tutupan Lahan

Dilakukan penguatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan melalui pemanfaatan data spasial dan citra satelit, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Langkah ini ditujukan untuk menjaga tutupan lahan dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Peningkatan Skala dan Kualitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan meningkatkan luasan dan kualitas rehabilitasi hutan dan lahan dengan mengutamakan jenis tanaman yang memiliki daya serap karbon tinggi. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan penguatan perhutanan sosial akan terus ditingkatkan guna menjamin keberlanjutan hasil rehabilitasi.

3. Penguatan Sinergi Lintas Kewenangan dan Pemangku Kepentingan

Dilakukan penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan kehutanan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas kewenangan menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas capaian kinerja.

4. Pengembangan Sistem Data dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca

Diperlukan penguatan sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data emisi gas rumah kaca sektor kehutanan yang terintegrasi dan akurat. Pengembangan basis data daerah serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengukuran dan pelaporan emisi akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas capaian kinerja.

5. Peningkatan Kepatuhan Dunia Usaha dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan preventif dan represif akan dilakukan secara seimbang untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan potensi pencemaran serta emisi.

6. Penguatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan akan terus ditingkatkan melalui edukasi, kampanye lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pendekatan berbasis komunitas diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

7. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Pembiayaan Alternatif

Diperlukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif, seperti CSR dan kemitraan dengan sektor swasta, untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan (FOLU), sekaligus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kualitas lingkungan hidup pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini difokuskan pada keterkaitan antara input yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan anggaran pada Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian sebagian besar indikator kinerja strategis, termasuk indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi anggaran telah dimanfaatkan secara relatif efisien, dimana peningkatan capaian kinerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan anggaran secara proporsional. Beberapa program dan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal melalui penguatan perencanaan, penajaman sasaran kegiatan, serta sinergi lintas sektor.

Dari aspek sumber daya manusia, pemanfaatan aparatur dengan kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta optimalisasi peran unit pelaksana teknis, berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penugasan personel secara tepat, disertai peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan, mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, dan rehabilitasi lingkungan.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga ditunjukkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal, termasuk penggunaan peralatan pemantauan kualitas lingkungan, pemanfaatan data spasial dan sistem informasi, serta dukungan teknologi dalam pengawasan dan pelaporan kinerja. Selain itu, pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dengan perangkat daerah lain, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat turut mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah serta meningkatkan nilai manfaat dari sumber daya yang digunakan.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi, khususnya pada kegiatan yang memerlukan jangkauan wilayah luas dan dukungan teknologi

yang memadai, seperti pengawasan kawasan hutan dan pengukuran emisi gas rumah kaca sektor kehutanan (FOLU). Keterbatasan sarana pendukung dan sistem data yang terintegrasi berpotensi mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dapat dinilai telah dilaksanakan secara relatif efisien dan mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan. Ke depan, peningkatan efisiensi akan terus diarahkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, serta peningkatan sinergi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 berkontribusi terhadap keberhasilan maupun belum optimalnya pencapaian pernyataan kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini difokuskan pada keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta capaian indikator kinerja strategis.

Sejumlah program dan kegiatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya bahkan terlampauinya sebagian besar indikator kinerja strategis. Program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi
Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi
Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani
Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Admsitratif
Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah CDLHK LT)
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2500 hektar per tahun wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah CDLHK PSC)
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC
Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat
Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan
Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan
Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar
Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan
Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Provinsi Banten didukung melalui pendekatan terpadu yang mencakup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan dan hutan, serta penguatan partisipasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha. Upaya ini berkontribusi terhadap capaian indikator kualitas lingkungan hidup tahun 2025 yang melampaui target, antara lain Indeks Kualitas Air sebesar 71,30 (105,58% dari target), Indeks Kualitas Udara sebesar 65,58 (102,04%), Indeks Kualitas Air Laut sebesar 85,73 (103,21%), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 62,59 (101,21%).

Pada aspek perencanaan, **Program Perencanaan Lingkungan Hidup** melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi KLHS memastikan kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan dokumen KLHS yang berkualitas menjadi dasar pengendalian tekanan terhadap kualitas air, udara, dan lahan.

Dalam aspek pengendalian pencemaran, **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** dilaksanakan melalui pencegahan, pemantauan kualitas lingkungan pada media tanah, air, udara, dan laut, serta penguatan fungsi laboratorium lingkungan. Kegiatan pengambilan contoh uji, pengoperasian alat pemantau kualitas lingkungan, serta penyediaan data indeks kualitas lingkungan hidup menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data.

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun melalui **Program Pengendalian B3 dan Limbah B3** berkontribusi dalam menekan potensi pencemaran air dan tanah melalui pengawasan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 lintas kabupaten/kota serta fasilitasi perizinan berbasis risiko.

Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan Hutan** dan **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)** yang mencakup rehabilitasi lahan kritis, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, serta penyediaan bibit tanaman hutan bersertifikat. Target rehabilitasi lahan kritis di wilayah Lebak, Tangerang, Pandeglang, Serang, dan Cilegon menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan fungsi ekologis dan daya serap karbon.

Selain itu, pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penyusunan rencana pengelolaan kehati serta penguatan peran masyarakat hukum adat dan kearifan lokal turut menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pendekatan sosial dan kelembagaan diperkuat melalui program pendidikan, pelatihan, penyuluhan lingkungan hidup, pemberian penghargaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara kolektif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut menunjukkan sinergi kebijakan dan implementasi teknis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Banten. Capaian indikator yang melampaui target mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim
Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Pencapaian sasaran strategis peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan secara terpadu. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah** mencapai **10,06% dari target 9,80% atau sebesar 102,65%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor limbah telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi berbasis pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran.

Upaya pencapaian indikator tersebut terutama didukung oleh pelaksanaan **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** serta **Program Pengelolaan Persampahan**, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan operasional dan penguatan tata kelola lingkungan.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini berperan dalam memperkuat kerangka pencegahan dan pengendalian pencemaran yang berkontribusi pada penurunan emisi dari sektor limbah. Pelaksanaan kegiatan meliputi:

- **Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**, melalui penyusunan dokumen pencegahan serta penguatan sistem pengendalian sumber pencemar.

- **Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi**, yang mendukung pengurangan emisi dari aktivitas pengelolaan limbah melalui pendekatan kebijakan dan teknis.
- **Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim**, yang memperkuat ketahanan sistem pengelolaan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim.
- **Inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi GRK daerah**, yang menjadi dasar perencanaan kebijakan dan pengukuran kinerja penurunan emisi secara terukur dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung tersedianya data dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengendalian emisi sektor limbah secara sistematis dan berkelanjutan.

Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan efektivitas penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi. Kegiatan utama meliputi:

- **Penanganan sampah pada TPA/TPST regional**, yang mendukung pengurangan timbulan emisi melalui pengelolaan sampah yang lebih terkontrol.
- **Penanganan sampah pada kondisi khusus kewenangan provinsi**, sebagai bentuk respons cepat terhadap potensi pencemaran dan peningkatan emisi dari timbulan sampah tertentu.
- **Koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pengelolaan sampah kabupaten/kota**, yang memperkuat tata kelola persampahan secara terpadu dan meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan daerah.

Pelaksanaan program ini sejalan dengan upaya penguatan operasional pengelolaan sampah di tingkat daerah, termasuk dukungan terhadap peningkatan efektivitas bank sampah dan sistem pengumpulan sampah terpilah—seperti yang juga didorong melalui fasilitasi sarana pengangkutan sampah untuk bank sampah di wilayah Provinsi Banten.

Keberhasilan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan pengelolaan persampahan memberikan dampak positif terhadap pengurangan potensi emisi dari sektor limbah sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Hal ini sejalan dengan capaian indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Banten Tahun 2025 yang secara umum melampaui target perencanaan.

Selain itu, pendekatan kolaboratif yang telah dilaksanakan melalui kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi pengendalian pencemaran dan pengelolaan persampahan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah. Untuk menjaga keberlanjutan

capaian kinerja, diperlukan penguatan pengelolaan persampahan terpadu, peningkatan kualitas data inventarisasi emisi, serta perluasan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan timbulan sampah dan pengendalian pencemaran.

3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan
Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem
Penataan kawasan Tahura Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU) di Provinsi Banten dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan DLHK Provinsi Banten diarahkan untuk menjaga fungsi serapan karbon, mengendalikan degradasi lahan, serta memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang difokuskan pada peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, penguatan peran masyarakat, perlindungan flora dan fauna, serta pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Banten.

Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan konservasi dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan kawasan, rehabilitasi ekosistem, serta pengelolaan daerah penyangga untuk menjaga fungsi ekologis wilayah. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan tutupan vegetasi dan pengurangan degradasi lahan yang menjadi faktor penting dalam penyerapan emisi karbon.

Perlindungan tumbuhan dan satwa liar, termasuk pengendalian dan pengawasan jenis yang tidak dilindungi maupun yang tidak termasuk dalam lampiran CITES, dilakukan melalui kegiatan monitoring, pengawasan, dan penyusunan laporan pengendalian di wilayah Lebak, Tangerang, Pandeglang, Serang, dan Cilegon. Upaya ini mendukung stabilitas ekosistem dan menjaga keseimbangan biodiversitas sebagai bagian dari sistem pengendalian emisi berbasis alam.

Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting serta di sekitar TAHURA menjadi strategi penting dalam pengurangan tekanan terhadap kawasan hutan. Melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan desa sekitar hutan, dikembangkan alternatif mata pencaharian berkelanjutan yang selaras dengan prinsip konservasi dan rendah emisi.

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Banten dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, kerja sama pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta penataan kawasan. Upaya pemulihan ekosistem dan pengamanan kawasan TAHURA berkontribusi langsung terhadap peningkatan fungsi serapan karbon dan pengurangan potensi emisi dari degradasi hutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan sektor FOLU menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pengendalian perubahan iklim berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Meskipun capaian indikator penurunan emisi GRK sektor kehutanan tahun ini tercatat sebesar 39,31% atau 94,34% dari target, berbagai program yang telah dilaksanakan menjadi fondasi penting untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya melalui penguatan rehabilitasi ekosistem, konservasi kawasan, dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2025 adalah sebesar 97.85% atau Rp. 68,335,691,354,- dari Pagu sebesar Rp. 69,838,668,805,-, sedangkan untuk realisasi pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2025 adalah sebesar 93.06% atau sebesar Rp. 312,141,500,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 335,420,000,-.

Adapun realisasi anggaran untuk masing masing sasaran sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	7,430,406,600	7,420,908,697	99.87
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	9,176,883,500	9,131,944,102	99.51
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	1,721,397,000	1,655,757,756	96.19
	JUMLAH	18,328,687,100	18,208,610,555	99.34

Secara umum efisiensi belanja berasal dari sisa belanja barang dan jasa berupa sisa kontrak, belanja perjalanan dinas serta belanja yang lainnya yang dilakukan secara swakelola.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dianalisis dengan mengacu pada prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai evaluasi kinerja anggaran.

Matrik efisiensi penggunaan anggaran untuk masing masing sasaran sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Fisik (%)	Capain/Realisasi Keuangan (%)	Nilai Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	105.58	99.87	5.41
	Indeks Kualitas Udara	103.21	99.87	3.24
	Indeks Kualitas Air Laut	102.04	99.87	2.12
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	101.21	99.87	1.33
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	102.65	99.51	3.06
Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	94.34	96.19	-1.96

Berdasarkan perbandingan antara capaian fisik dan realisasi keuangan, sebagian besar indikator kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang positif. Pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan*, seluruh indikator mencapai capaian fisik di atas 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 99,87 persen. Nilai efisiensi yang dihasilkan berkisar antara 1,33 hingga 5,41, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian kinerja dapat dicapai tanpa melebihi alokasi anggaran yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan penggunaan anggaran yang relatif efisien dan selaras dengan output serta outcome yang dihasilkan.

Demikian pula pada indikator *Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah*, capaian fisik sebesar 102,65 persen dengan realisasi keuangan 99,51 persen menghasilkan nilai efisiensi sebesar 3,06. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor limbah telah mampu menghasilkan kinerja di atas target dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Namun demikian, pada sasaran strategis *Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (FOLU)*, capaian fisik sebesar 94,34 persen dengan realisasi keuangan 96,19 persen menghasilkan nilai efisiensi negatif

sebesar -1,96. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada sektor kehutanan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan sektor kehutanan yang memerlukan waktu pemulihan ekosistem yang relatif panjang, keterbatasan ruang intervensi pemerintah daerah, serta faktor eksternal lain yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 dapat dinilai telah dilaksanakan secara relatif efisien, khususnya pada indikator kualitas lingkungan hidup dan sektor limbah. Sementara itu, untuk sektor kehutanan (FOLU), diperlukan penajaman perencanaan dan penguatan strategi pelaksanaan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menunjukkan capaian yang secara umum efektif dan melampaui target pada sebagian besar indikator strategis. Peningkatan kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang seluruhnya berada di atas target kinerja.

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah juga menunjukkan hasil positif dengan capaian melampaui target, didukung oleh penguatan pengelolaan persampahan, inventarisasi emisi, serta pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi.

Namun demikian, kinerja penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengendalian perubahan tutupan lahan, rehabilitasi ekosistem, serta penguatan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan menunjukkan sinergi antara perencanaan, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten..

4.2 Saran saran rekomendasi

Diperlukan peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan, optimalisasi pengelolaan persampahan, peningkatan kepatuhan usaha, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berbagai upaya yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun berikutnya antara lain :

1. Penguatan Pengendalian Emisi Sektor Kehutanan (FOLU)

- Mempercepat rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan ekosistem, khususnya pada wilayah dengan tekanan penggunaan lahan tinggi.
- Memperluas program penghijauan, rehabilitasi mangrove, dan pembangunan hutan rakyat berbasis partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan dan kepatuhan pemegang izin.

2. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan dan Limbah

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA/TPST regional melalui pendekatan pengurangan sampah dari sumber.

- Memperkuat sistem inventarisasi emisi GRK sektor limbah berbasis data kabupaten/kota.
- Mendorong inovasi teknologi pengolahan sampah rendah emisi dan ekonomi sirkular.

3. Penguatan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan dan jaringan pemantauan kualitas air dan udara.
- Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terintegrasi berbasis data real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan.

4. Peningkatan Kepatuhan Usaha dan Penegakan Hukum Lingkungan

- Memperkuat pembinaan dan pengawasan izin lingkungan secara berbasis risiko.
- Mengoptimalkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan penerapan sanksi administratif secara konsisten.

5. Penguatan Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam program perlindungan lingkungan hidup.
- Memperluas program edukasi lingkungan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

6. Penguatan Perencanaan dan Sinergi Kebijakan

- Memastikan integrasi KLHS dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengelolaan DAS, rehabilitasi lahan, dan pengendalian pencemaran.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

A. DAMENTA

Pihak Pertama,



Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,26
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,48
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	82,97
3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,08

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	316.120.000
4.1.02	Retribusi Daerah	316.120.000
	JUMLAH	316.120.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	68.098.605.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.571.672.000
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.724.933.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	115.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	80.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	465.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	55.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.337.000.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	9.136.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.196.000.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.065.000.000

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	925.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	950.000.000
	JUMLAH	77.234.605.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,



DR. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

1) Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarang, 28 Oktober 2025



PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.420.000	PAPBD
4.1.02	Retribusi Daerah	335.420.000	PAPBD
	JUMLAH	335.420.000	

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.765.052.805	PAPBD
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.509.981.705	PAPBD
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000	PAPBD
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.795.386.100	PAPBD
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000	PAPBD
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000	PAPBD
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000	PAPBD
2.11.07	PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000	PAPBD
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000	PAPBD
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000	PAPBD
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000	PAPBD
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000	PAPBD
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000	PAPBD
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.859.390.000	PAPBD
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.721.397.000	PAPBD
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000	PAPBD
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000	PAPBD
	JUMLAH	69.838.668.805	

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,

Dr. WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19671217 198803 1 006

**SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

DPPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	67,53
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	64,27
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	83,06
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	61,84
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persen	9,80
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	41,67

2) Surat Pernyataan telah di reviu



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Dr. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

3) Lain - lain yang dianggap perlu